

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upaya pembangunan nasional ialah upaya bersama untuk memperluas sumber daya manusia yang harus dilakukan secara berkelanjutan untuk menghadapi kekhawatiran global. Pendidikan ialah komponen kunci dari upaya peningkatan sumber daya manusia. Pendidikan akan bermakna jika berikan kontribusi bagi perkembangan intelektualitas bangsa, sebagaimana diamanatkan oleh alinea pembukaan UUD 1945.

Semua lembaga pendidikan, serta masyarakat dan orang-orang, berbagi tanggungjawab untuk proses pendidikan. Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwasannya pendidikan nasional berperan dalam mengembangkan dan membentuk masyarakat Indonesia yang berwatak dan peradaban bangsa, demi terbentuknya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan jadi warga negara yang demokratis, serta kesadaran akan tanggungjawab serta tanggungjawab terhadap masyarakat luas.

Evolusi dan proses peningkatan mutu pendidikan sama-sama dipengaruhi oleh tertibnya operasional lembaga pendidikan. Kualitas input, proses, dan output saling terkait erat untuk melaksanakan tugas manajemen yang efektif. Pendidikan dapat dilihat dari dua perspektif: teoritis dan praktis. Jika dilihat dari perspektif teoritis ialah suatu proses kegiatan yang membantu untuk membentuk manusia dewasa, sedangkan jika dilihat dari perspektif praktis ialah kegiatan kelembagaan yang berkaitan dengan bagaimana mengolah kegiatan sehingga jadi kegiatan pendidikan yang menghasilkan hasil sebaik mungkin.

Hal mendasar bagi pertumbuhan basis sumber daya manusia Indonesia ialah pencapaian tingkat pendidikan dasar. Diperlukan semua sumber daya pemerintah untuk mensukseskan terapi yang diberikan dalam upaya mensukseskan peningkatan sumber daya manusia. Anak usia 7-15 tahun diharapkan mengikuti pendidikan dasar pada jenjang SD dan SMP, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang mengatur bahwasannya anak usia 7-15 tahun wajib bersekolah di SD dan SMP.

Institusi - institusi di tingkat sekolah dasar dan menengah berusaha untuk mengembangkan orang-orang dewasa dan seringkali didanai oleh pemerintah. Proses pengelolaan tidak terlepas dari beberapa persoalan mendasar, antara lain keadilan internal, keterbukaan, akuntabilitas publik, dan efisiensi pendanaan program pendidikan.

Keinginan akan akuntabilitas jadi semakin penting dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menjamin kualitas pendidikan tetap terjaga. Pengertian akuntabilitas yang dilaksanakan oleh sekolah beri dampak kinerja sekolah secara keseluruhan (Ingersol & Collins, 2017). Pemberian stimulus pembiayaan pendidikan dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang jadikan pendidikan dasar sebagai motor penggerak akuntabilitas pemerintah dengan berikan gambaran tentang proses kegiatan kelembagaan yang baik dan berkualitas, ialah komponen kunci dari strategi pendidikan dasar pemerintah. Untuk melakukan ini, sekolah dalam skenario ini harus membuat desain akuntabilitas yang mempromosikan administrasi pendanaan pendidikan yang paling efisien.

Peran pemimpin dalam berikan perlakuan kepada lembaga pendidikan sangat penting untuk efektivitas keterbukaan dan akuntabilitas dalam pendanaan lembaga pendidikan (Shilon & Schechter, 2016). Keberhasilan ini memerlukan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, keterlibatan masyarakat, komitmen masyarakat, infrastruktur yang sesuai, dan pelaksanaan prosedur peraturan secara konstan sambil menyusun kurikulum. Eksekusi tindakan untuk mencapai tujuan ini

membutuhkan proses, dan jika Anda mengantisipasi perubahan, diperlukan kemampuan kepala sekolah untuk mengubah budaya pengelolaan keuangan pendidikan.

Dalam mewujudkan sekolah jadi lembaga unggulan, bantuan operasional sekolah (BOS) ialah aspek yang harus ditangani secara tepat selain sumber pendanaan lain sebagai penggerakannya. Bagi kepala sekolah tertentu untuk merencanakan dan menggunakan uang pembiayaan pendidikan, pengembangan sekolah secara keseluruhan akan jadi landasan untuk melakukannya. Ini akan mencakup pengembangan jangka pendek, menengah, dan panjang yang sejalan dengan tujuan, visi, dan tujuan sekolah (Kisbiyanto, 2014).

Pengelolaan pendidikan di tingkat pendidikan dasar harus menggunakan prinsip manajemen yang kekinian. Objek perhatian dalam tata kelola pendidikan dasar tidak jauh beda dengan organisasi lainnya. *The Six's M* jadi objek dalam pengelolaan manajemen dapat diterapkan pada lembaga pendidikan jenjang dasar berdasarkan pendapat Lipan James dalam buku Kepemimpinan Kepala Sekolah (Wahjosumidjo, 2013). Keenam objek tersebut ialah; *Man* (manusia), *Money* (dana/uang), *Material* (bahan-bahan), *Machine* (mesin/peralatan proses), *Method* (cara memproses), *Market* (pasar/konsumen)

Keenam objek tersebut sangat memerlukan keselarasan dengan rencana dan tujuan sekolah terutama pada jenjang pendidikan dasar. Objek utama yang sangat berdampak dalam berjalannya sebuah sekolah ialah pendanaan uang, tidak mungkin ada lembaga persekolahan tanpa pengelolaan pembiayaan pendidikan. Pengelolaan pembiayaan pendidikan akan berjalan baik jika *Standar of Procedure* diperhatikan oleh pimpinan sekolah.

Peran stimulus pembiayaan pendidikan melalui bantuan operasional sekolah (BOS) harus mempunyai tata kelola yang baik.. Pengelolaan keuangan sekolah penting untuk dilakukan agar dana yang diperoleh dapat digunakan secara maksimal demi pengembangan kegiatan persekolahan. Peran pengelolaan ataupun manajemen ialah seni di dalam proses pemberdayaan sumber daya manusia, sumber lain harus dilakukan

dengan efektif dan efisien agar tujuan tercapai (Hasibuan, 2011).

Pengelolaan pembiayaan pendidikan idealnya ialah ialah sebuah alur kegiatan yang sistematis. Hal tersebut sejalan dengan pendapat menyatakan bahwasannya pembiayaan pendidikan ialah kegiatan yang terdiri dari perolehan dana (pendapatan) yang diterima dan cara penggunaan untuk membiayai seluruh program pendidikan yang telah direncanakan (Akdon Kurniady & Darmawan, 2015).

Proses kemandirian bangsa Indonesia dalam tata kelolakeuangan sekolah terutama sisi akuntabilitas sangat diperlukan kerjasama antar pemangku kebijakan pendidikan. Bersumber dari (Report, 2017) dari UNESCO dalam Global Report Meeting aksesibilitas dalam dunia pendidikan ialah mutlak dan di dalam pengelolaan kegiatannya komite sekolah mempunyai hak atas informasi kegiatan persekolahan.

Akuntabilitas pendidikan akhir-akhir ini semakin gencar dibicarakan selaras dengan tuntutan masyarakat untuk pendidikan yang bermutu. Pilar perwujudan akuntabilitas secara umum ialah transparansi, standar kinerja, dan partisipasi (Heryati Y dan Muhsin M, 2014). Penelitian terdahulu menemukan bahwasannya penyelenggaraan keterbukaan pembiayaan pendidikan di sekolah pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan (Fitri, 2014). Keterkaitan antara penelitian terdahulu tentang penyelenggaraan pembiayaan pendidikan dan pilar akuntabilitas berikan keterbaruan dimensi pada aspek kajian. Penelitian ini berikan dimensi baru dalam usaha pencapaian akuntabilitas dalam proses pengelolaan pembiayaan pendidikan harus didasarkan pada transparansi kepala sekolah, standar kinerja dan kemampuan kepala sekolah menciptakan pola kemitraan dengan komite sekolah ialah implementasi dari integritas mutu sekolah.

Kabupaten Bogor membuat kebijakan pada penataan manajemen pembiayaan pendidikan di seluruh lembaga pendidikan dasar di Kabupaten Bogor menggunakan bantuan aplikasi web *SIRKAS* sebagai perwujudan *e-budgeting* dengan bantuan aplikasi tersebut diharapkan tujuan pengelolaan pembiayaan pendidikan jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Bogor jadi optimal. Penggunaan aplikasi dalam

penatakelolaan pembiayaan pendidikan sesuai dengan penelitian terdahulu yang menyimpulkan perlunya aplikasi dalam penata pembiayaan pendidikan agar efektifitas pendidikan optimal (Alkaf, 2012). Hal tersebut mempunyai keseuaian dengan pasal 48 Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 yang menyatakan pengelolaan biaya pendidikan didasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik (Kemendiknas, 2003).

Untuk memilih lokasi penelitian yaitu SDN Gunungsari 01 Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor ialah representasi sekolah unggulan yang mempunyai keunikan dalam hal pengelolaan manajerial sekolah sesuai rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor yang didasarkan pada dokumen pelaporan pembiayaan Pendidikan 5 tahun terakhir serta Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS) pada 2017 yang menunjukkan hasil nilai 90 dengan kategori baik. Faktor yang bisa menunjukkan hal tersebut ditunjukkan dari : bangunan sekolah yang memadai, ditambah dengan sarana dan prasarana untuk menunjang bakat dan minat peserta didik, serta prestasi secara regional ialah salah satu sekolah berprestasi di Kecamatan Pamijahan.

Sekolah yang didirikan pada tanggal 6 Januari 1979 ialah salah satu sekolah yang mapan dalam pengelolaan sekolah. Data pokok pendidikan menunjukkan model Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) jadi landasan sekolah dalam pengembangannya. Jumlah siswa di SDN Gunungsari 01 pada tahun 2020/2021 dalam kategori banyak sejumlah 330 siswa yang membutuhkan pelayanan maksimal baik akademik maupun non akademik. Bahkan dalam kondisi darurat pandemik COVID 19 SDN Gunungsari 01 mempunyai keunikan dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan dengan melakukan usaha pemenuhan kebutuhan siswa agar dapat belajar dengan optimal.

SDN Gunungsari 01 mempunyai prestasi akademik maupun nonakademik kurun 5 tahun terakhir dengan kategori baik. Prestasi yang ditorehkan SDN Gunungsari 01 tidak mungkin terjadi tanpa ada konsep yang optimal , dukungan dari berbagai pihak dan sisi teknis pengelolaan yang baik. Bapak Jayadi selaku Kepala SDN Gunungsari 01 mengemukakan langkah strategis yang dilakukan sekolah dalam melakukan

pengelolaan sekolah yakni mengidentifikasi kebutuhan sekolah dan sumber daya, inovasi program, pemenuhan operasional sekolah serta solusi kekurangan pelayanan untuk mencari sumber penganggaran kebutuhan sekolah. Ketersediaan dana yang cukup memadai akan jadi faktor utama untuk maju dan berkembang.

Kegiatan pembiayaan pendidikan meliputi sebuah keadaan perencanaan dan penggunaan yang berdasarkan fakta hasil grand tour berupa observasi, wawancara, dan studi dokumen di SDN Gunungsari 01 menunjukkan ketidaksinkronan menyebabkan pelaporan tidak maksimal. Padahal dalam hasil penelitian telah ditemukan konsep transparansi meliputi sistem dan alur yang sudah ditentukan yang berdasarkan dengan kredibilitas pemimpin sebagai sebuah etika dalam akuntabilitas pemimpin sekolah (Clark, 2006). Hal ini dikuatkan dengan pernyataan bahwasannya biaya ialah unsur utama kegiatan mekanisme penganggaran (Mulyono, 2010).

Penulis melakukan observasi terhadap pengembang kebijakan mengenai pengelolaan pembiayaan pendidikan di Kabupaten Bogor menghasilkan kesimpulan bahwasannya pelaksanaan pembiayaan pendidikan di sekolah dasar negeri di Kabupaten Bogor terdapat sangat terkait terhadap; alasan ketatatan terhadap peraturan hukum yang berlaku, kecenderungan perilaku menyimpang terhadap penggunaan dana pembiayaan pendidikan kepala sekolah, manajemen berbasis sekolah untuk jenjang pendidikan dasar dengan melibatkan komite belum diterapkan secara maksimal, dan kurangnya pengetahuan mengenai tatalaksana pembiayaan pendidikan.

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor mengimplementasikan pengawasan secara makro terhadap akuntabilitas kepala sekolah di wilayah kerja mereka. Analisis kuantitatif pelaporan realisasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan sumber lain pembiayaan sampai ke perpajakan dilakukan secara teratur oleh manajemen dan pengawas sebagai evaluator akuntabilitas kepala sekolah. Penghargaan dan hukuman juga dilakukan terhadap sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor sebagai contoh jika ada sekolah mendapatkan predikat akuntabilitas sekolah dengan baik akan mendapatkan penghargaan berupa insentif pembiayaan tambahan sedangkan yang mengalami kegagalan dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan

mendapat sanksi dan teguran

Tingkat ketercapaian sebuah akuntabilitas dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan didasarkan juga pada standar kinerja kepala sekolah. Kinerja dari kepala sekolah didasarkan visi dan misi lembaga pendidikan yang jadi arah penunjuk ketercapaian penyelenggaraan pendidikan yang optimal. Pendapat ini diperkuat dari hasil penelitian terdahulu mengenai standar kinerja sekolah perlu pendalaman profil sekolah yang detail dari visi dan rencana strategis sekolah harus memenuhi hal yang kompleks (Paletta, 2019).

Penemuan fakta di lapangan SDN Gunungsari 01 tidak melakukan pemetaan jalan penyelenggaraan pendidikan dengan baik. Rencana strategis sekolah bahkan tidak ditemukan penulis dalam kegiatan observasi awal. Padahal keterkaitan erat antara standar kinerja kepala sekolah dengan pembiayaan pendidikan ialah sebuah kesatuan karena kegiatan yang direncanakan melalui penjabaran visi dan misi sekolah akan terpenhi maksimal jika ada sinergi dengan manajemen pembiayaan pendidikan

Fakta selanjutnya ialah mengenai dokumen RKAS sekolah yang memunculkan bahwasannya dalam perencanaan kegiatan sekolah sangat tidak memenuhi kebutuhan pada sekolah tersebut. Padahal Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor sudah memfasilitasi sekolah dengan menggunakan aplikasi pengelolaan pembiayaan pendidikan dengan nama SIRKAS yang mengutamakan *e-budgeting*.

Hasil observasi penulis yakni pembiayaan pendidikan dalam pelaksanaan kelembagaan sekolah tidak bersifat efektif dan efisien. Ada temuan ketika pada kegiatan perencanaan sekolah untuk pemeliharaan gedung sekolah semisal pengecatan ruang kelas namun setelah ditelusuri kegiatan ini tidak dilaksanakan pada kegiatan anggaran berjalan. Padahal dokumen pelaporan menunjukkan adanya pencantuman kegiatan tersebut dalam tahun anggaran sehingga terindikasi penyalahgunaan kewenangan.

Temuan penulis menunjukkan pelaksanaan *reward and punishment* di SDN Gunungsari 01 yang dilakukan terutama terhadap kapasitas sebagai kepala sekolah tidak berjalan dengan optimal. Karena kepala sekolah tidak mempunyai kecermatan

dalam kemampuan pengelolaan pembiayaan pendidikan. Hal ini ditunjukkan pada hasil penelitian terdahulu yang menarik kesimpulan bahwasannya peran pelatihan terhadap kepala sekolah dalam manajemen keuangan sekolah harus diperbanyak intensitas nya dan diperkuat kemampuan pengetahuannya (Phylisters, 2018)

Kepala sekolah sebagai pemimpin di lembaga sekolah terlihat tidak menjalankan fungsi manajemen dengan baik yang berbasis standar kinerja. Mekanisme penggunaan sampai ke pertanggungjawaban tidak berjalan secara semestinya. Dari kegiatan perencanaan, pengoraganissian, pelaksanaan, pengawasan sangat lemah karena kualitas dari RKAS sampai dengan kegiatan dan laporan mengalami ketidaksinkronan dalam dokumen ataupun dalam wujud implementasi yang telah dilaksanakan. Bersumber dari Inpres Nomor 7 tahun 1999 menyebutkan bahwasannya setiap instansi pemerintah di Indonesia harus melaksanakan peran akuntabilitas (Wibowo, 2013). Tidak terkecuali di lembaga sekolah karena hal ini ialah pertanggungjawaban instansi yang dilakukan secara periodik.

Penelusuran pada observasi penulis sejalan dengan hasil kajian penelitian terdahulu bahwasannya pengelolaan pembiayaan pendidikan sangat terkait politis dalam kegiatannya sangat bergantung kegiatan politis pengambil kebijakan (You, 2017) sehingga sifat otonomi sekolah terutama di Kabupaten Bogor tidak berjalan secara maksimal karena pejabat yang mempunyai kemampuan pengembangan kebijakan dalam hal pendidikan terganggu dengan ketidaksinkronan program-program pendidikan.

Ketaatan penyelenggara pendidikan di sekolah terlihat sangat kurang optimal. Hal ini dapat ditinjau dari studi dokumen pada salah SDN Gunungsari 01 yang memuat pengelolaan pembiayaan pendidikan dalam anggaran tahun 2020 sangat tidak menggunakan prinsip manajemen pendidikan secara maksimal dalam proses perencanaan dan penggunaan pembiayaan pendidikan. Pada penelitian terdahulu menunjukkan adanya temuan bahwasannya kepala sekolah mempunyai keterampilan sosial dalam usaha manajemen keuangan sekolah dengan pihak lain (Phylisters, 2018).

Pemberdayaan terhadap kemitraan terhadap komite sekolah dilakukan dengan secara terus menerus sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala sekolah. Pola kemitraan kepala SDN Gunungsari 01 masih berjalan kurang baik hal ini ditunjukkan dari hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dengan keterbukaan pada pengelolaan pembiayaan pendidikan yang terkesan hanya dikuasai oleh kepala sekolah saja. Hal ini ditunjukkan pada saat Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melakukan monitoring dan evaluasi pembiayaan pendidikan sebagian besar komite sekolah tidak mengetahui tentang pengelolaan pembiayaan pendidikan yang dilakukan oleh sekolah.

Secara ideal pengelolaan pembiayaan pendidikan mengindikasikan bahwasannya keputusan biaya pendidikan di sekolah mengacu pada aturan yang mendasari dalam perencanaan dan penggunaan. Bahwasannya satuan pendidikan tidak boleh memungut dana kepada siswa/orang tua siswa. Saat ini pembiayaan operasional sekolah, sepenuhnya bersumber pada BOS (Biaya Operasional Sekolah). Walaupun masih dimungkinkan sekolah bisa meminta sumbangan kepada orang tua siswa/masyarakat kegiatan pelibatan komite sekolah masih sangat kurang biasanya hanya menerima jadi RKAS dari sekolah tanpa ada pelibatan secara aktif.

Pendapat guru SDN Gunungsari 01 yang berikan pernyataan bahwasannya kelayakan dan konsistensi pengelolaan pembiayaan pendidikan di sekolah, diserahkan kepada kebijakan intern sekolah melalui kepala sekolah sebagai pejabat kuasa pengguna anggaran yang sering diartikan segala hal jadi kuasa kepala sekolah tanpa harus ada kemitraan dengan komite sekolah dalam pengelolalan pembiayaan pendidikan. Fakta ini menunjukkan kemitraan dalam kegiatan tersebut sangat sulit dibangun karena ketidakefektifan dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan sehingga kepala sekolah berperan *one man show*. Pola kemitraan kepala sekolah dengan komite sekolah masih tidak konsisten dalam pelaksanaannya sehingga akuntabilitas kepala sekolah menunjukkan masih mengalami kekurangan kemitraan dengan komite sekolah karena hanya dimonopoli oleh kepala sekolah dalam kegiatannya.

Pengelolaan pembiayaan pendidikan yang sifatnya harus terbuka dan transparan yang ialah indikator dari sebuah makna akuntabilitas ini berikan dorongan penulis untuk melakukan kajian secara mendalam mengenai akuntabilitas kepala sekolah dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan di SDN Gunungsari 01 yang pada saat ini masih belum akuntabel dan asal berjalan tanpa kaidah manajemen yang tepat. Akuntabilitas kepala sekolah dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan diwujudkan dalam transparansi pengelolaan, standar kinerja kepala sekolah, serta kemampuan kemitraan pada kegiatan pengelolaan pembiayaan pendidikan di sekolah.

Peran pemimpin dalam mewujudkan sebuah cita-cita dalam lembaga masih tidak berjalan sebagai mana mestinya. Faktor yang beri dampak rendahnya ataupun buruknya manajemen pembiayaan pendidikan di sekolah kemampuan SDM baik kepala sekolah, bendahara, dan staff administrasi disekolah jenjang pendidikan dasar. Seperti yang dikemukakan dalam penelitian sebelumnya bahwasannya kualitas sistem data dan kegiatan dalam pengelolaan sekolah harus terjadi sinergi dalam perwujudan tujuan lembaga (Rahmatullah, 2017).

Kompleksitas permasalahan dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan SDN Gunungsari 01 di Kabupaten Bogor berikan ketertarikan penulis untuk melakukan sebuah kajian. Pengelolaan pembiayaan pendidikan tidak hanya kegiatan mengeluarkan dana saja. Akan tetapi ada upaya melakukan sebuah penghimpunan semua faktor dari usaha pengelolaan pembiayaan pendidikan tersebut. Hal tersebut akan lebih mempermudah capaian visi dan misi sekolah agar tercapai optimal dan sangat diperlukan figur kepala sekolah yang mempunyai akuntabilitas pengelolaan pembiayaan pendidikan yang baik.

SDN Gunungsari 01 mempunyai unsur pembiayaan yang utama dari pemerintah berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Namun alokasinya sangat terbatas sehingga diperbolehkan untuk mencari sumber lain dari sumbangan masyarakat yang dikelola oleh sekolah bersama dengan komite sekolah. Pemanfaatan pencarian penambahan sumber dana tersebut melalui usaha yang dilakukan kepala sekolah dalam usaha mencapai tujuan sekolah dan terciptanya akuntabilitas

pengelolaan pembiayaan pendidikan. Peran kepala sekolah sangat krusial dalam tatanan perwujudan akuntabilitas kepala sekolah dalam mengelola pembiayaan pendidikan (Ingersol & Collins, 2017).

Berdasarkan hal tersebut penulis berusaha melakukan kajian mendalam mengenai akuntabilitas kepala sekolah dalam pengelolaan pembiayaan Pendidikan di SDN Gunungsari 01. Permasalahan inilah yang dalam pelaksanaan banyak menyimpang arah dari rencana dan terdapat kesenjangan fakta dengan prestasi kepala SDN Gunungsari 01 dalam hal pengelolaan pembiayaan pendidikan. Terciptanya akuntabilitas kepala sekolah dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan di SDN Gunungsari 01 diharapkan akan menciptakan *Good Governance* pelayanan pendidikan bermutu.

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah akuntabilitas kepala sekolah dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan. Sedangkan Sub fokus pada penelitian ini adalah:

1. Transparansi kepala sekolah terhadap pengelolaan pembiayaan pendidikan SDN Gunungsari 01 Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.
2. Standar kinerja kepala sekolah dalam pengelolaan pembiayaan SDN Gunungsari 01 Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.
3. Kemampuan kepala sekolah dalam menjalin kemitraan dengan komite sekolah terhadap proses pengelolaan pembiayaan pendidikan SDN Gunungsari 01 Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.

C. Pertanyaan Penelitian

Dari fokus dan sub fokus penelitian yang sudah dikemukakan di atas, maka muncul pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana transparansi kepala sekolah dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan di SDN Gunungsari 01 Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor?
2. Bagaimana standar kinerja kepala sekolah dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan di SDN Gunungsari 01 Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor ?
3. Bagaimana kemitraan kepala sekolah dengan komite sekolah dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan di SDN Gunungsari 01 Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran akuntabilitas kepala sekolah dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan pada SDN Gunungsari 01 Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor yang di dalamnya didukung terhadap pemenuhan sebagai berikut:

1. Transparansi kepala sekolah terhadap pengelolaan pembiayaan pendidikan SDN Gunungsari 01 Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor
2. Standar kinerja kepala sekolah dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan SDN Gunungsari 01 Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor
3. Kemampuan kepala sekolah dalam menjalin kemitraan dengan komite sekolah terhadap proses pengelolaan pembiayaan pendidikan SDN Gunungsari 01 Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Sekolah

Sumbangan pemikiran tentang evaluasi dan perbaikan mengenai pengelolaan pembiayaan pendidikan yang baik di SDN Gunungsari 01 Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.

2. Bagi Kabupaten Bogor

Memberikan gambaran kualitas akuntabilitas kepala sekolah sebagai upaya perbaikan kinerja kepala sekolah. Serta diperlukan suplemen pelatihan bagi kepala SD negeri di Kabupaten Bogor dalam mengelola pembiayaan pendidikan.

F. State of the art

Kajian penelitian yang akan dilakukan penulis menggunakan rujukan penelitian terdahulu sebagai landasan untuk pengembangan pada penelitian. Adapun penelitian yang relevan tesis yang akan dikerjakan ialah :

- a. Michael R Ford tahun 2016 dengan judul “*Milwaukee Voucher-School Leaders Views On*”. Tujuan penelitian ini ialah untuk menentukan hubungan antara sebuah program voucher untuk pendidikan digunakan untuk mendefinisikan sebuah akuntabilitas terhadap pengembangan program tersebut. Hasil penelitian yang menggunakan metode survey dengan 116 sampel sekolah yakni adanya akuntabilitas sekolah sangat terlihat dari pelepasan program voucher pendidikan karena kepala sekolah akan berikan integritas penuh dalam pelaksanaan program tersebut karena kegiatan tersebut dari perencanaan program sampai pertanggungjawabannya jadi hak publik.
- b. Skripsi Afriliana Fitritahun 2016 dengan judul “Pengelolaan dana BOS di Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Mandiangi Koyo Selatan Kota Bukit Tinggi. Variabel dalam penelitian ini ialah penyelenggaraan BOS pada sekolah dengan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pembiayaan pendidikan sebagai bagian dari bahasan variabelnya. Metode Penelitiannya ialah kuantitatif dengan 51 sampel dengan analisis regresi sederhana. Hasil Penelitiannya ialah menunjukkan bahwasannya

penggunaan dana BOS tepat guna serta adanya gambaran kompleksitas dalam penyelenggaraan pembiayaan pendidikan di sekolah dasar negeri.

c. Disertasi dengan judul “Analisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APBS terhadap partisipasi murid. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran terhadap partisipasi orang tua murid dalam pembiayaan pendidikan di Kota Depok. Objek penelitiannya ialah SMA Negeri di Kota Depok. Instrumen penelitiannya ialah kuesioner yang diberikan kepada orangtua murid, guru, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bendahara, komite sekolah sebagai responden. Variabel penelitiannya ialah akuntabilitas, transparansi, pengelolaan serta partisipasi orang tua. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya partisipasi orangtua terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APBS terdapat pengaruh positif.

d. Disertasi dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sekolah Menengah Atas dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Kabupaten Boyolali Jawa Tengah. Penulisnya ialah Utama. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menjadikan 6 SMA swasta dan 6 SMA Negeri di Kabupaten Boyolali sebagai objek penelitian. Informan ditetapkan menggunakan *purposive sampling*, *snowball sampling*, *internal sampling*, *eksternal sampling*. Data diambil dengan wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Penggunaan BSC (*Balance Score Board*) dalam analisis datanya untuk menemukan hasil yang mendalam. Penelitian ini menghasilkan bahwasannya strategi penggalangan dana sama dengan sumber dana lain belum optimal. Perencanaan RKAS tidak memenuhi kaidah dan alokasi terbanyak untuk belanja pegawai.

e. Penelitian oleh Amanda Keddie, Brad Gobby & Chris Wilkins tahun 2017. Dengan judul “*School autonomy reform in Queensland: governance, freedom and entrepreneurial leadership and management*”. Penelitian ini menguji konsepsi penguasaan dan kebebasan yang melekat terhadap kebijakan otonomi sekolah di Queensland. Penelitian menggunakan metode komparasi dengan membandingkan sampel dua kepala sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya penciptaan ruang kebebasan dalam

otonomi sekolah akan menghasilkan performa sekolah yang optimal. Pemenuhannya ialah dengan dilakukan sebuah *enterpreunal leadership* yang digunakan kepala sekolah mampu meningkatkan akuntabilitas sekaligus pengembangan sekolah kearah yang bermutu.

f. Disertasi Muhamad Azis tahun 2012. “Pengaruh Pembiayaan Pendidikan, Kompensasi Finansial, Dukungan Ekonomi Rumah Tangga, dan Kepuasan terhadap Kinerja Guru dan Hasil Belajar Bidang Studi Ekonomi (Studi tentang Pendidikan Menengah di Sulbar). Pada sebuah penganggaran ditemukan bahwasannya dukungan dari kompensasi finansial, dukungan ekonomi rumah tangga masih rendah apalagi pada kinerja yang masih perlu ditingkatkan. Hasil penelitiannya ialah (1) Pembiayaan pendidikan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja guru dan hasil belajar bidang studi ekonomi (2) Kompensasi finansial mempunyai pengaruh signifikan dalam kinerja guru dan hasil belajar (3) Pengaruh yang signifikan dalam ekonomi rumah tangga melalui pembiayaan pendidikan, kompensasi finansial, dan kepuasan kerja

g. Phillip Hallinger & James Ko. 2015. “*Education Accoubtability and principal leadership effects in Hongkong Primary Schools*”. Penelitian ini meneliti hubungan antara pemimpin di level sekolah dalam level kapasitas sekolah terhadap peningkatan *output* belajar siswa. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pengambilan data menggunakan kuesioner pada 32 sekolah dasar di Hongkong. Hasil penelitian yakni bahwasannya konteks sosiokultural dan organisasi sekolah membentuk kepemimpinan sekolah yang berhasil.

h. Daniel Reyes-Guerra Marriane R. Russo, Ira E Bogotch and Maria Vasquez_Colina. Tahun 2014. Penelitian ini berujuan melakukan eksplorasi terhadap otonomi sekolah dan akuntabilitas. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data 15 sekolah. Hasil penelitian menunjukkan akuntabilitas sekolah dapat dikembangkan untuk mendapatkan mutu yang baik hal ini ditunjukkan pada otonomi sekolah dalam pelajaran, kurikulum, dan pengaturannya bersifat lokal

dan peningkatan standar akuntabilitasnya akan digunakan sebagai standar, pemerintah federal, dan pusat.

Setelah melakukan kajian terhadap penelitian yang relevan maka penelitian ini memberikan kebaruan penelitian dalam usaha pencapaian akuntabilitas dalam proses pengelolaan pembiayaan Pendidikan di SD Negeri Gunungsari 01 Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor harus didasarkan pada transparansi kepala sekolah, standar kinerja dan kemampuan kepala sekolah menciptakan pola kemitraan dengan komite sekolah yang ialah implementasi dari integritas mutu sekolah dengan menggunakan studi kasus supaya dapat tergambar secara mendalam yang terjadi pada kegiatan kepala SDN Gunungsari 01 Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor dalam mengelola pembiayaan pendidikan.

